BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Seiring pertumbuhan ekonomi yang terus meningkat, pemerintah secara bertahap menerapkan program pembangunan lintas sektor, baik dalam dimensi fisik maupun non- fisik. Salah satu sektor yang mengalokasikan dana terbesar adalah sektor pengadaan barang/jasa. Untuk mewujudkan rencana pembangunan yang telah disetujui melalui proses legitimasi politik, pemerintah menjalin kerja sama, atau lebih dikenal sebagai kemitraan, dengan para pelaku usaha di berbagai sektor terkait. Kolaborasi ini bertujuan untuk melaksanakan berbagai proyek pengadaan yang terdapat dalam lingkungan Kementerian, Lembaga, Pemerintah Daerah dengan tujuan pembangunan nasional.¹

Sebagai upaya untuk memenuhi hak dan kebutuhan pelayanan umum yang layak diperlukan landasan hukum yang kokoh dalam proses pengadaan barang/jasa. Pengadaan barang/jasa pemerintah harus menjamin kepastian hukum dan memberikan perlindungan bagi setiap warga negara dan masyarakat dari penyalahgunaan wewenang di dalam penyelenggaraan pengadaan barang/jasa guna menciptakan iklim pengadaan barang/jasa yang kondusif.²

Istilah pengadaan barang/jasa atau *procurement* diartikan secara luas, mencakup tahapan perencanaan, persiapan, pemilihan penyedia, pelaksanaan kontrak hingga serah terima hasil pekerjaan. Dalam proses pengadaan barang/jasa, diperlukan pelaku pengadaan yang merupakan pihak-pihak yang

¹ Khaulah Sayu Ramadhani, Ermanto Fahamsyah, Mohammad Ali, "Perlindungan Hukum Bagi Penyedia Atas Pemutusan Sepihak Kontrak Konstruksi Dalam Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah," *Equivalent: Jurnal Ilmiah Sosial Teknik*, vol. 6, no. 1 (2024), hlm. 2.

² Diah Sulistiyan RS Zaenal Arifin, Soegianto, "Perlindungan Hukum Perjanjian Kemitraan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pada Bidang Kontruksi," *Jurnal USM Law Review*, vol. 3, no. 1 (2020), hlm 61.

terlibat secara langsung dalam pelaksanaan pengadaan. Sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang pelaku pengadaan barang/jasa untuk pengadaan melalui penyedia barang/jasa maupun swakelola terdiri dari Pengguna Anggaran (PA) atau Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pengadaan (PP), Pokja Pemilihan, Agen Pengadaan, dan Penyedia. Setiap peran tersebut memiliki tanggung jawab masing-masing dalam pelaksanaan proses pengadaan barang/jasa. PPK dalam konteks pengadaan barang dan jasa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh PA atau KPA untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menyebabkan pengeluaran dana dari anggaran negara atau anggaran daerah.³

Salah satu pelaku pengadaan barang dan jasa adalah jasa konstruksi. Jasa konstruksi adalah bidang usaha yang umumnya disukai oleh masyarakat pada berbagai tingkat seperti yang tampak melalui semakin besarnya jumlah perusahaan yang fokus dibidang usaha jasa konstruksi. Banyaknya perusahaan jasa konstruksi yang meningkat tersebut nyatanya tidak disertai meningkatnya kinerja dan kualifikasinya yang tercermin pada kenyataan yang tergambar dalam realita bahwa teknologi, modal, efisiensi pemanfaatan SDM, ketepatan waktu pelaksanaan, dan kualitas produk pada pelaksanaan jasa konstruksi belum seperti yang diinginkan. Pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (UUJK) menyebutkan bahwa “semua pekerja konstruksi wajib bisa menunjukkan bukti kompetensi dari sertifikat, jika tidak mempunyai

³ Heru Triawan, “Pelanggaran Prosedur Hukum Oleh Pejabat Pembuat Komitmen Dalam Pengadaan Barang/ Jasa (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat nomor 162/PDT.G/2017/PN.JKT.PST)”,” *Jurnal Ilmial Ilmu Pendidikan dan Sosial/Sosioedukasi*, vol. 11, no. 1 (2022), hlm 4

sertifikat dengan demikian diberi sanksi, yakni diberhentikan dari pekerjaannya.⁴

Dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (UUK) menetapkan bahwa “secara umum jasa konstruksi adalah pelayanan jasa konsultasi perencanaan konstruksi, pengawasan pekerjaan konstruksi, dan pelaksanaan pekerjaan konstruksi”. Begitupun perumusan mengenai pekerjaan konstruksi. Berikutnya pada Pasal 1 Angka 2 UUK kebijakan itu juga menetapkan bahwa “pekerjaan konstruksi secara umum menjadi sebagian rangkaian ataupun keseluruhan aktivitas pelaksanaan ataupun perencanaan yang meliputi pekerjaan Elektrikal, Mekanikal, Sipil, Arsitektural, ataupun lingkungan dan pelengkapannya dalam mencapai sebuah konstruksi dalam bentuk bangunan fisik dari infrastruktur”.

Melalui efektivitas penegakan Hukum Konstruksi tentunya dapat menertibkan dan memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan konstruksi infrastruktur nasional maupun daerah sebagai satu kesatuan yang utuh menurut hukum positif tersebut. Hukum Konstruksi juga harus dapat menempati posisi sebagai ukuran normatif dalam mengantisipasi berbagai eksekusi atau dampak serta hal-hal yang tidak diinginkan yang merugikan berbagai pihak sehubungan dengan pelaksanaan kerja konstruksi dalam arti luas. Sehingga kalau unsur-unsur pelanggaran hukum konstruksi telah terpenuhi atas suatu pelaksanaan Skema Kerja Proyek Konstruksi, maka itu harus dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum yang berlaku dan mengikat tersebut (*legal and binding*).⁵

⁴ Edison Hatoguan Manurung, “Kontrak Konstruksi Infrastruktur Ditinjau Dari Perspektif Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi,” *Legal Studies Journal*, vol. 2, no. 2 (2022), hlm. 32.

⁵ Tjandra, Riawan, *Hukum Sarana Pemerintahan*, Prenada Media:Jakarta, 2023. hlm 89

Serangkaian aktivitas pembangunan nasional dan daerah secara berkelanjutan sangat menentukan tingkat kemakmuran yang berkeadilan tersebut, karena itu, mewujudkan ragam konstruksi infrastruktur yang baik sangat dibutuhkan oleh publik tentunya akan sangat berpotensi menunjang perkembangan serta terpenuhinya segenap kebutuhan dalam perikehidupan sebagai bangsa dan negara. Hal itu, sudah seharusnya pula berbanding lurus dengan intensitas kemajuan di bidang Industri Strategis yang ditopang oleh regulasi yang berkeadilan dan visioner, khususnya terkait upaya menyikapi dinamika pada sektor Pelaksanaan Kerja dan Produk Jasa Konstruksi. Sehingga terlihat jelas, bahwa sektor konstruksi menjadi aspek yang penting atau urgensif dalam merekonstruksi ruang-ruang fisik kehidupan pada suatu bangsa dan negara.⁶

Perusahaan kontraktor dalam menjalankan tugasnya juga harus menyediakan peralatan-peralatan sendiri yang diperlukan untuk menangani proyek yang dibebankan kepadanya, oleh karena itu, dalam menjalankan pekerjaannya perusahaan kontraktor biasanya membagi pekerjaannya dengan perusahaan kontraktor lain yang mempunyai keahlian yang diperlukan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan yang tidak dikuasai oleh kontraktor utama. Perusahaan yang menjalankan pekerjaan kontraktor dari kontraktor lainnya biasa disebut sub kontraktor.⁷

Pada Pelaksanaan Kontrak Kerja Konstruksi terdapat dua pihak yang mengikatkan diri dalam suatu Kontrak Kerja Konstruksi yaitu Pengguna jasa dan Penyedia jasa. Pengguna jasa ialah pemilik atau pemberi pekerjaan yang

⁶ Undrizon, Yuhelson, Ardian Prasetyo Dedy, "Efektivitas Perlindungan Hukum terhadap Pembangunan Infrastruktur dalam Mendukung Industri Strategis untuk Kesejahteraan Nasional," *Jurnal Sosial dan Teknologi (SOSTECH)*, vol. 4, no. 6 (2024), hlm. 7

⁷ Zaenal Arifin, Soegianto, "Perlindungan Hukum Perjanjian Kemitraan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pada Bidang Konstruksi," hlm. 62.

menggunakan layanan jasa konstruksi sedangkan Penyedia jasa ialah pemberi layanan jasa konstruksi. Menurut Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, Pengguna Jasa dan Penyedia jasa adalah orang perseorangan dan badan.

Jenis jasa yang diberikan oleh Penyedia jasa dibedakan menjadi tiga jenis jasa yaitu jasa konsultasi konstruksi, jasa pekerjaan konstruksi, dan jasa pekerjaan konstruksi terintegrasi. Bentuk jasa yang diberikan dalam jasa konsultasi konstruksi antara lain; pengkajian, perencanaan, perancangan, pengawasan dan manajemen penyelenggaraan konstruksi, konsultasi ilmiah dan teknis, pengujian dan analisis ilmiah, survei, pengujian teknis, serta analisis. Bentuk jasa yang diberikan dalam jasa pekerjaan konstruksi antara lain; pembangunan, pemeliharaan, pembongkaran, serta pembangunan kembali. Bentuk jasa yang diberikan dalam jasa pekerjaan konstruksi terintegrasi antara lain; rancang bangun, dan perekayasaan, pengadaan, pelaksanaan.

Namun dalam pelaksanaannya, pekerjaan kontraktur tidak selalu berjalan lancar. Banyak masalah yang terjadi saat melakukan pekerjaannya. Seperti kasus lahan belum bersih dan bebas (*clear and clean*). Para penyelenggara pengadaan barang jasa pemerintah merasa tidak nyaman dan terusik serta was-was dalam menyelenggarakan pengadaan barang jasa pemerintah akibat kerap kali aparat penegak hukum (baik oknum polisi dan/atau oknum kejaksaan) melakukan pemanggilan dan/atau pemeriksaan terhadap penyelenggara yang tengah menyelenggarakan pengadaan barang jasa pemerintah. Mereka beralasan bahwa adanya laporan dari pihak-pihak (masyarakat, LSM ataupun pihak yang terkait dalam pengadaan barang jasa pemerintah) yang mengindikasikan adanya

penyimpangan prosedur dan pelanggaran hukum dalam penyelenggaraan pengadaan barang jasa pemerintah.⁸

Seperti masalah status tanah yang tertuang dalam paket pembangunan Polder/Pompa KBN, Sunter C, Greenville (RT 13) dan IKPN Bintaro dengan nomor kontrak 20822/KR.01.06 tanggal 28 Maret 2024 menyampaikan bahwa status kepemilikan lahan tersebut tercatat milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan unit Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta yang termasuk ke dalam Kartu Investaris Barang (KIB) A, agar pembangunan Rumah Pompa KBN dapat terlaksana dengan baik, Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta mohon untuk dapat dilakukan penerbitan terhadap bangunan liar yang terkena dampak pembangunan.

Berdasarkan kontrak pekerjaan konstruksi Nomor 20822/KR.01.06 tanggal 28 Maret 2024 mengatakan bahwa telah melakukan serah terima lapangan dari pejabat pembuat komitmen kepada penyedia pekerjaan pembangunan Polder/Pompa KBN, Sunter C, Greenville (RW 13) dan IKPN Bintaro. Sejak serah terima dilakukan maka seluruh tanggung jawab disebutkan dalam dokumen kontrak menjadi kewajiban Penyedia sampai dilakukan serah terima kembali pekerja dari Penyedia kepada Pejabat Pembuat Komitmen.

Namun dalam pelaksanaannya terjadi masalah kasus perkara 464/Pdt.G/2024/PN.Jtk.Utr pada Proyek Pembangunan Polder/ Pompa KBN, Sunter C, Greenvil (RW 13), dan IKPN Bintaro yang masih berjalan, bahwa klaim kepemilikan lahan tidak berdasar, karena faktanya penggugat adalah warga bernama Tubagus dan Sutiyeah yang mendirikan bagunan di atas lahan milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Lokasi yang diklaim sebagai milik penggugat merupakan badan air atau sungai sehingga kepemilikan lahan tersebut

⁸ Kansil, Kansil Christine, *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta, 2017, hlm 11

merupakan klaim kosong dari penggugat. Warga yang mendirikan bangunan liar di atas badan sungai milik Pemprov DKI Jakarta, yang di atas lokasi tersebut oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan di bangun rumah pompa sebagai upaya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mengurangi dan menanggulangi dampak banjir di lokasi Jakarta Utara.

Dalam pelaksanaan pembangunan Rumah Pompa ini di antaranya Kepala Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta tergugat I, PT. Nindya Karya tergugat II, Walikota Jakarta Utara sebagai turut tergugat I, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Jakarta Utara turut tergugat II, Kecamatan Cilicing turut tergugat III dan Kelurahan Rorotan turut tergugat IV. Pemprov DKI Jakarta melalui jajarannya yaitu Camat dan Lurah telah melakukan sosialisasi kepada warga terdampak dari pembangunan Rumah Pompa tersebut, pada tanggal 2 Mei berisi tentang sosialisasi kegiatan pembangunan Pompa KBN di lahan milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Jakarta yang terletak di Kampung Kasepatan dan menyampaikan agar warga mendukung pembangunan tersebut serta bersedia membongkar bangunan miliknya. Dalam perkembangannya dari 7 KK warga yang berdampak akibat pembangunan Pompa KBN ada 2 KK yang tidak bersedia pindah yaitu para penggugat dalam perkara *a qua*.

Pada tanggal 1 Juli 2024 Lurah telah menghimbau kepada warga serta pelaku usaha terdampak proyek pembangunan Rumah Pompa di Kelurahan Rorotan agar membongkar sendiri bangunannya serta menaati ketentuan peraturan perundangan dengan tidak mendirikan bangunan serta berusaha di tempat yang dilarang sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 8 tahun 2007 pada Pasal 36 (1) huruf b dan pada Pasal 25 ayat (2).

PT. Nindya Karya tergugat II adalah sebagai pihak penyedia jasa pelaksana pengerjaan proyek pembangunan Pompa merasa terganggu dengan kasus yang sedang berjalan ini, PT. Nindya Karya harus tetap menjalankan tugasnya karena mempunyai target yang sudah disepakati dengan pemerintah. Hal ini membuat pekerjaan yang seharusnya selesai tepat waktu, terganggu dengan perkara dengan nomor 464/Pdt.G/2024/PN.Jtk.Utr yang terjadi pada Proyek Pembangunan Polder/ Pompa KBN, Sunter C, Greenvil (RW 13), dan IKPN Bintaro, oleh karena itu pentingnya perlindungan hukum bagi penyedia jasa konstruksi dalam kasus lahan yang belum bersih dan bebas (*clear and clean*). Selain itu, dalam proses pengerjaan PT. Nindya Karya masih melaksanakan tugas walau lahan belum bersih dan bebas (*clear And clean*), oleh karena itu perlunya tanggungjawab pengguna jasa dalam hal ini Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terhadap penyedia jasa konstruksi akibat lahan belum bersih dan bebas (*clear And clean*) pada Proyek Pembangunan Polder/ Pompa KBN, Sunter C, Greenvil (RW 13), dan IKPN Bintaro.

Melihat permasalahan-permasalahan tersebut menarik minat penulis untuk mengadakan suatu penelitian untuk mendapatkan penyelesaian dan kesesuaian dengan hukum dan perundangan serta pendapat para pakar mengenai perlindungan hukum bagi penyedia jasa dalam kontrak konstruksi pada kasus lahan belum bersih dan bebas (*clear and clean*). Penelitian ini bertempat di Proyek Pembangunan Polder/ Pompa KBN, Sunter C, Greenvil (RW 13), dan IKPN Bintaro dimana ruang lingkup tulisan hanya membahas seputar perlindungan hukum terhadap Perlindungan Hukum Bagi Penyedia Jasa Dalam Kontrak Konstruksi Pada kasus Lahan Belum Bersih dan Bebas (*Clear And Clean*).

Berdasarkan permasalahan yang telah dijelaskan di atas maka penulis tertarik meneliti lebih lanjut mengenai “**Perlindungan Hukum Bagi Penyedia Jasa Dalam Kontrak Konstruksi Pada kasus Lahan Belum Bersih dan Bebas (*Clear And Clean*) (Studi Kasus Pada Proyek Pembangunan Polder/ Pompa KBN, Sunter C, Greenvil (RW 13), dan IKPN Bintaro)”**”

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah berisi pertanyaan-pertanyaan penting yang terkait dengan Pembahasan pada Latar Belakang. Rumusan masalah dituliskan dengan poin-poin sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan hukum bagi penyedia jasa dalam kontrak konstruksi pada kasus lahan belum bersih dan bebas (*clear and clean*) pada Proyek Pembangunan Polder/ Pompa KBN, Sunter C, Greenvil (RW 13), dan IKPN Bintaro?
2. Apa tanggungjawab pengguna jasa dalam hal ini Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terhadap penyedia jasa konstruksi akibat lahan belum bersih dan bebas (*clear And clean*) pada Proyek Pembangunan Polder/ Pompa KBN, Sunter C, Greenvil (RW 13), dan IKPN Bintaro?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah dijelaskan tersebut diatas, maka tujuan dari penulisan ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan perlindungan hukum bagi penyedia jasa dalam kontrak konstruksi pada kasus lahan belum bersih dan bebas (*clear and clean*) (Studi Kasus Pada Proyek Pembangunan Polder/ Pompa KBN, Sunter C, Greenvil (RW 13), dan IKPN Bintaro).

2. Untuk mengetahui tanggungjawab pengguna jasa dalam hal ini Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terhadap penyedia jasa konstruksi akibat lahan belum bersih dan bebas (*clear and clean*) (Studi Kasus Pada Proyek Pembangunan Polder/ Pompa KBN, Sunter C, Greenvil (RW 13), dan IKPN Bintaro).

D. Manfaat Penelitian

Dengan dilakukannya penelitian ini maka manfaatnya sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya konsep atau teori yang berkaitan dengan Perlindungan Hukum Bagi Penyedia Jasa Dalam Kontrak Konstruksi. Selain itu diharapkan juga bahwa penelitian ini dapat menjadi bahan acuan bagi lembaga atau pihak-pihak yang berminat melakukan penelitian lanjutan yang berkaitan dengan Perlindungan Hukum Bagi Penyedia Jasa Konstruksi Dalam Kontrak Konstruksi.

2. Secara Praktis

a. Manfaat Bagi Pemerintah Daerah

Untuk meningkatkan perlindungan hukum bagi penyedia jasa dalam kontrak konstruksi pada kasus lahan belum bersih dan bebas (*clear and clean*), hendaknya Pemerintah Daerah menyelesaikan masalah dengan masyarakat sebestum menggunakan penyedia jasa.

b. Manfaat Bagi Penyedia Jasa Konstruksi

Penyedia jasa konstruksi perlu mempertimbangkan perlindungan hukum yang didapat sebelum menandatangani kontrak dan mempertimbangkan peraturan, penambahan waktu, dengan aturan presentase yang jelas terkait kemajuan pekerjaan penyedia.

c. Manfaat Bagi Masyarakat

Dengan adanya penelitian ini maka diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran bagi akademisi, praktisi hukum, serta masyarakat luas berkaitan dengan Perlindungan Hukum Bagi Penyedia Jasa Dalam Kontrak Konstruksi.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian tentang perlindungan hukum bagi penyedia jasa dalam kontrak konstruksi pada kasus lahan belum bersih dan bebas (*clear and clean*), oleh karenanya penyusun dalam hal ini akan menelaah pustaka terkait penelitian terdahulu untuk memastikan keaslian dari penelitian ini. Beberapa hasil penelitian berupa terdahulu dalam ruang lingkup perlindungan hukum bagi penyedia jasa konstruksi, namun belum ada yang secara khusus menulis mengenai kasus lahan belum bersih dan bebas (*clear and clean*) dalam perlindungan hukum bagi penyedia jasa konstruksi. Pembahasan mengenai pengadaan perlindungan hukum bagi penyedia jasa konstruksi yang relevan dengan penelitian ini berupa tesis antara lain sebagai berikut :

1. Penelitian Ramadhani dkk tahun 2024 yang berjudul “Perlindungan Hukum Bagi Penyedia Atas Pemutusan Sepihak Kontrak Konstruksi Dalam Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah”. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap penyedia pada kontrak konstruksi yang diputus secara sepihak, dan mengetahui bagaimana konsep kedepan agar kontrak konstruksi memberikan perlindungan hukum bagi penyedia. Penelitian ini memiliki perbedaan dengan yang akan dilakukan yaitu fokus penelitian akan dilakukan yaitu pada kasus lahan belum bersih dan bebas (*clear and clean*), sementara penelitian sebelumnya fokus pada

Pemutusan Sepihak Kontrak Konstruksi Dalam Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.⁹

2. Penelitian Arifin dkk tahun 2020 yang berjudul “Perlindungan Hukum Perjanjian Kemitraan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pada Bidang Kontruksi”. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis, mengetahui dan memahami perlindungan hukum perjanjian kemitraan pengadaan barang/jasa pemerintah pada jasa konstruksi sesuai dengan Peraturan Presiden No 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan bagaimana kelemahan dan solusi atas pelaksanaan perjanjian kemitraan pengadaan barang/jasa pemerintah pada jasa konstruksi. Penelitian ini memiliki perbedaan dengan yang akan dilakukan yaitu fokus penelitian akan dilakukan yaitu pada kasus lahan belum bersih dan bebas (*clear and clean*), sementara penelitian sebelumnya fokus pada perjanjian kemitraan pengadaan barang/jasa pemerintah pada jasa konstruksi.¹⁰
3. Penelitian Hidayah dkk tahun 2023 yang berjudul “Perlindungan hukum Pengguna jasa Dalam Penyelesaian Pencairan jaminan Pelaksanaan (*Performance Bond*) Kontrak Kerja Kontruksi Pemerintah”. menganalisis kedudukan hukum Jaminan Pelaksanaan dalam Kontrak Kerja Konstruksi dan bentuk perlindungan hukum bagi Pengguna jasa dalam penyelesaian pencairan Jaminan Pelaksanaan. Dari hasil penelitian menunjukan Jaminan Pelaksanaan merupakan perjanjian tambahan dari perjanjian pokok (Kontrak Kerja Konstruksi) yaitu perjanjian yang pemenuhannya dijamin dengan perjanjian jaminan. Penelitian ini memiliki perbedaan dengan yang akan

⁹ Ramadhani, Fahamsyah, Ali, “*Perlindungan Hukum Bagi Penyedia Atas Pemutusan Sepihak Kontrak Konstruksi Dalam Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah*,” hlm. 1–18.

¹⁰ Zaenal Arifin, Soegianto, “*Perlindungan Hukum Perjanjian Kemitraan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pada Bidang Kontruksi*,” hlm. 59–76.

dilakukan yaitu fokus penelitian akan dilakukan yaitu pada kasus lahan belum bersih dan bebas (*clear and clean*), sementara penelitian sebelumnya fokus pada Perlindungan hukum Pengguna jasa Dalam Penyelesaian Pencairan jaminan Pelaksanaan (*Performance Bond*) Kontrak Kerja Kontruksi Pemerintah.¹¹

F. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

a. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu Hak Asasi Manusia kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut.¹² Perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.¹³

Menurut Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers, perlindungan hukum adalah jaminan perlindungan pemerintah dan atau masyarakat kepada warganegara dalam melaksanakan fungsi, hak, kewajiban, dan peranannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga,

¹¹ Hidayah Nawir Iin, Rembrandt, M. Hasbi, "Perlindungan hukum Pengguna jasa Dalam Penyelesaian Pencairan jaminan Pelaksanaan (*Performance Bond*) Kontrak Kerja Kontruksi Pemerintah," *Jurnal Hukum*, vol. 7, no. 3 (2023), hlm. 514.

¹² Satjipto Rahardjo, *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Jakarta: Kompas, 2017, hlm 121

¹³ Setiono, "Rule of Law," (Surakarta: Disertasi S2 Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, 2018, hlm 3

perlindungan hukum adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan.

Berdasarkan penjelasan diatas peneliti menggunakan teori perlindungan hukum karena teori ini berkaitan dengan penegakan hukum tidak lain untuk memastikan subjek hukum memperoleh setiap haknya khususnya yaitu bagi penyedia jasa dalam kontrak konstruksi. Kemudian, apabila ada pelanggaran akan hak-hak tersebut, adanya perlindungan hukum dapat memberikan perlindungan penuh pada bagi penyedia jasa dalam kontrak konstruksi hukum yang menjadi korban.

b. Teori Tanggungjawab

Menurut Hans Kelsen dalam teorinya tentang tanggung jawab hukum menyatakan bahwa: “seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum, subyek berarti bahwa dia bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan. Lebih lanjut Hans Kelsen menyatakan bahwa: ¹⁴

“Kegagalan untuk melakukan kehati-hatian yang diharuskan oleh hukum disebut kekhilafan (negligence); dan kekhilafan biasanya dipandang sebagai satu jenis laindari kesalahan (culpa), walaupun tidak sekeras kesalahan yang terpenuhi karena mengantisipasi dan menghendaki, dengan atau tanpa maksud jahat, akibat yang membahayakan.”

¹⁴ Hans Kelsen (a) , 2017, sebagaimana diterjemahkan oleh Somardi, *General Theory Of law and State , Teori Umum Hukum dan Negara, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif Empirik*,BEE Media Indonesia, Jakarta, hlm. 81

Hans Kelsen selanjutnya membagi mengenai tanggungjawab terdiri dari: ¹⁵

1. Pertanggungjawaban individu yaitu seorang individu bertanggung jawab terhadap pelanggaran yang dilakukannya sendiri.
2. Pertanggungjawaban kolektif berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas suatu pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain.
3. Pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan yang berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena sengaja dan diperkirakan dengan tujuan menimbulkan kerugian
4. Pertanggungjawaban mutlak yang berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena tidak sengaja dan tidak diperkirakan.

Tanggung jawab dalam kamus hukum dapat diistilahkan sebagai liability dan responsibility, istilah liability menunjuk pada pertanggungjawaban hukum yaitu tanggung gugat akibat kesalahan yang dilakukan oleh subjek hukum, sedangkan istilah responsibility menunjuk pada pertanggungjawaban politik.¹⁶ Teori tanggung jawab lebih menekankan pada makna tanggung jawab yang lahir dari ketentuan Peraturan Perundang-Undangan sehingga teori tanggungjawab dimaknai dalam arti liability, sebagai suatu konsep yang terkait dengan kewajiban hukum seseorang yang bertanggung jawab

¹⁵ Hans Kelsen (b), sebagaimana diterjemahkan oleh Raisul Mutaqien, *Teori Hukum*, Murni Nuansa & Nusa Media, Bandung, 2016, hlm. 140.

¹⁶ HR. Ridwan, 2016, *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 337.

secara hukum atas perbuatan tertentu bahwa dia dapat dikenakan suatu sanksi dalam kasus perbuatannya bertentangan dengan hukum.¹⁷

Dalam penyelenggaraan suatu Negara dan pemerintahan, pertanggungjawaban itu melekat pada jabatan yang juga telah dilekati dengan kewenangan, dalam perspektif hukum publik, adanya kewenangan inilah yang memunculkan adanya pertanggungjawaban, sejalan dengan prinsip umum; “*geenbevegedheid zonder verantwoordelijkheid; thereis no authority without responsibility*; la sulthota bila mas-uliyat”(tidak ada kewenangan tanpa pertanggungjawaban).¹⁸

Menurut Abdulkadir Muhammad teori tanggung jawab dalam perbuatan melanggar hukum (*tort liability*) dibagi menjadi beberapa teori, yaitu :¹⁹

- b. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja (*intertional tort liability*), tergugat harus sudah melakukan perbuatan sedemikian rupa sehingga merugikan penggugat atau mengetahui bahwa apa yang dilakukan tergugat akan mengakibatkan kerugian.
- c. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan karena kelalaian (*negligence tort lilability*), didasarkan pada konsep kesalahan (*concept of fault*) yang berkaitan dengan moral dan hukum yang sudah bercampur baur (*interminglend*).

¹⁷ Busyra Azheri, 2017, Corporate Social Responsibility dari Voluntary menjadi Mandotary, Raja Grafindo Perss, Jakarta, hlm. 54.

¹⁸ Ibid hlm 352

¹⁹ Abdulkadir Muhammad, 2015, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, hlm. 336

- d. Tanggung jawab mutlak akibat perbuatan melanggar hukum tanpa mempersoalkan kesalahan (*strict liability*), didasarkan pada perbuatannya baik secara sengaja maupun tidak sengaja.

Berdasarkan uraian diatas peneliti menggunakan teori tanggungjawab memberikan arah/petunjuk serta menjelaskan gejala yang diamati, oleh karena itu penelitian diarahkan kepada hukum positif yang berlaku yaitu tentang tanggung jawab penyedia jasa terhadap kewajiban perlindungan hukum bagi Konstruksi Dalam Kontrak Konstruksi, dengan dasar teori tanggung jawab menjadi pedoman guna menentukan bagaimana kedudukan dan tanggungjawab penyedia jasa.

2. Kerangka Konseptual

a. Perlindungan Hukum

Secara umum, perlindungan berarti mengayomi sesuatu dari hal-hal yang berbahaya, sesuatu itu bisa saja berupa kepentingan maupun benda atau barang. Selain itu perlindungan juga mengandung makna pengayoman yang diberikan oleh seseorang terhadap orang yang lebih lemah. Dengan demikian, perlindungan hukum dapat diartikan dengan segala upaya pemerintah untuk menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada warga negaranya agar hak- haknya sebagai seorang warganegara tidak dilanggar, dan bagi yang melanggarnya akan dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku.²⁰

Menurut Hetty Hasanah perlindungan hukum yaitu merupakan segala upaya yang dapat menjamin adanya kepastian hukum, sehingga

²⁰ Bryan A. Garner, *Black's Law Dictionary, ninth edition, (St. paul: West), 2024, hlm 1343*

dapat memberikan perlindungan hukum kepada pihak-pihak yang bersangkutan atau yang melakukan tindakan hukum. Pengertian perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan terhadap subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.²¹

Satjipto Raharjo mendefinisikan perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.²²

Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum

²¹ Setiono, "Rule of Law," (Surakarta: Disertasi S2 Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, 2018, hlm 3

²² Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum, Cetakan ke-IX*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2021 hlm 73

berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan. Perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya. Berkaitan dengan konsumen, berarti hukum memberikan perlindungan terhadap hak-hak pelanggan dari sesuatu yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak tersebut.²³

Sedangkan menurut Setiono, perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia. Menurut Muchsin, perlindungan hukum merupakan kegiatan untuk melindungi individu dengan menyasikan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antar sesama manusia.²⁴

Dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum merupakan segala bentuk upaya pengayoman terhadap harkat dan martabat manusia serta terhadap hak asasi manusia di bidang hukum. Berkaitan dengan konsumen, berarti hukum memberikan perlindungan terhadap

²³ Hadjon Philipus, *Perlindungan Bagi Rakyat di Indonesia*, Surabaya PT Bima ilmu, 2017. hlm 134

²⁴ Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, (Surakarta; Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2018. Hlm 14

hak-hak pelanggan atau konsumen dari sesuatu yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak tersebut.

b. Penyedia Jasa Konstruksi

Menurut Undang-undang No.18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi, jasa konstruksi adalah layanan jasa konsultasi perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi, dan layanan jasa konsultasi pengawasan pekerjaan konstruksi. Sedangkan pekerjaan konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan perencanaan dan/atau pelaksanaan beserta pengawasan yang mencakup pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektrik, dan tata lingkungan masing-masing beserta kelengkapannya untuk mewujudkan suatu bangunan atau bentuk fisik lainnya. Sedangkan menurut Peraturan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional No 11a Tahun 2008 memberikan definisi bahwa Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi adalah jenis usaha jasa konstruksi yang menyediakan layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi, yang dibedakan menurut bentuk usaha, klasifikasi dan kualifikasi usaha jasa pelaksana konstruksi.

Menurut Peraturan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional No 10 Tahun 2013 memberikan definisi bahwa Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi adalah jenis usaha jasa konstruksi yang menyediakan layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi, yang dibedakan menurut bentuk usaha, klasifikasi dan kualifikasi usaha jasa pelaksana konstruksi. Sedangkan Pekerjaan Konstruksi menurut Undang-undang No.18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi adalah

keseluruhan atau sebagian dari rangkaian kegiatan perencanaan dan/atau pelaksanaan beserta pengawasan yang menyangkut pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektrikal, dan tata lingkungan, masing-masing beserta kelengkapannya, untuk mewujudkan suatu bentuk bangunan atau bentuk fisik lainnya.

c. Kontrak Kerja Konstruksi

Berdasarkan *Blacklaws Dictionary* kontrak kerja konstruksi dapat didefinisikan sebagai:

“Construction Contract is type of contract in which plans and specification for construction are made a part of the contract itself and commonly it secured by performance and payment bonds to protect both subcontractor and party for whom building is being constructed.”

Kontrak kerja konstruksi adalah suatu bentuk perjanjian atau kontrak yang dirancang secara khusus untuk keperluan konstruksi dan merupakan bagian integral dari perjanjian tersebut. Kontrak semacam itu biasanya memberikan perlindungan bagi kedua belah pihak, baik subkontraktor maupun pemilik bangunan, yang merupakan pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian tersebut.²⁵

Edward Whitticks dalam bukunya "*Construction Contract, How to Manage Contract and Control Disputes in a Volatile Industry*" mengemukakan pandangannya tentang definisi dan elemen-elemen krusial dalam kontrak kerja konstruksi :²⁶

“The construction contract is an agreement between the parties for the performance of work through the supply of labor and materials. First, a valid contract must be sufficiently certain to have a practical meaning and before execution the parties must

²⁵ Salim, *Perkembangan Hukum Kontrak Innominat di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2003, hlm 91

²⁶ Edward Whitticks, *Construction Contract, How to Manage Contract and Control Disputes in a Volatile Industry*, Texas: Gulf Publishing Company, 2005, hlm 2

have agreed on all terms and conditions. Second, there must also be an agreement on the consideration and on the payment terms. Third, the contract must be in writing. A contract is not easily enforceable if it remains entirely as an oral agreement and without written evidence.”

Dalam konteks pelaksanaan kontrak untuk pekerjaan konstruksi, Edward Whitticks menegaskan pentingnya kontrak kerja konstruksi sebagai perjanjian yang disepakati antara pihak-pihak yang bersedia melaksanakan pekerjaan konstruksi dengan menyediakan tenaga kerja dan material konstruksi yang dibutuhkan. Kontrak untuk pekerjaan konstruksi harus mencakup secara tegas dan pasti semua persyaratan sebelum memulai pekerjaan, dan harus disepakati oleh kedua belah pihak. Selain itu, kontrak kerja konstruksi juga mencakup pengaturan mengenai syarat dan ketentuan kontrak serta prosedur pembayaran. Kontrak kerja konstruksi haruslah dalam bentuk tertulis karena perjanjian lisan sulit untuk dibuktikan secara sah.

Sejalan dengan konsep kontrak kerja konstruksi yang umumnya diterapkan di negara-negara maju, di Indonesia setiap pelaksanaan pekerjaan konstruksi diatur melalui kontrak kerja konstruksi yang menjadi dasar hukum bagi keterikatan antara Pengguna jasa dan Penyedia Jasa Konstruksi. Ini sejalan dengan ketentuan Pasal 1 angka 8 dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi yang memberikan definisi kontrak kerja konstruksi sebagai keseluruhan dokumen kontrak yang mengatur hubungan hukum antara Pengguna jasa dan Penyedia Jasa dalam penyelenggaraan jasa konstruksi.

d. Lahan Belum Bersih dan Bebas (*Clear And Clean*)

PP 39 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum. Peraturan ini menetapkan perubahan dalam penyelenggaraan pengadaan tanah, termasuk mekanisme, prosedur, dan aspek ganti rugi.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Yuridis sosiologis adalah suatu pendekatan dengan berdasarkan norma-norma atau peraturan yang mengikat, sehingga diharapkan dari pendekatan ini dapat diketahui bagaimana hukum yang secara empiris merupakan gejala masyarakat itu dapat dipelajari sebagai suatu variabel penyebab yang menimbulkan akibat-akibat pada berbagai segi kehidupan sosial. Penelitian yuridis sosiologis adalah penelitian hukum menggunakan data sekunder sebagai data awalnya, yang kemudian dilanjutkan dengan data primer dilapangan atau terhadap masyarakat, meneliti efektivitas suatu peraturan dan penelitian yang ingin mencari hubungan (korelasi) antara berbagai gejala maupun variabel, sebagai alat pengumpulan data terdiri dari studi dokumen atau bahan pustaka dan wawancara.²⁷ Penelitian hukum sosiologis adalah penelitian hukum untuk mendapatkan data primer²⁸, data primer adalah data yang diperoleh dari sumber pertama yaitu PPK Proyek dari Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta dan Pimpinan proyek dari PT. Nindya Karya.

2. Sifat Penelitian

²⁷ Elisabeth Nurhaini Butar Butar, *Metode Penelitian Hukum, Langkah-Langkah untuk menemukan kebenaran dalam ilmu hukum*, Refika Aditama, Bandung, 2018.

²⁸ Maiyestati, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, LPPM Universitas Bung Hatta: Padang, hlm 23, hlm 49

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan deskriptif analisis, yang artinya suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum. Dengan kata lain penelitian yang bersifat deskriptif analisis ini mengambil masalah atau memusatkan perhatian kepada masalah-masalah sebagaimana adanya saat penelitian dilaksanakan.

3. Jenis dan Sumber Data

a. Jenis Data

1) Data Primer

Data primer merupakan sumber data yang diperoleh langsung dari sumber asli (tidak melalui media perantara). Data primer dapat berupa opini subjek (orang) secara individual atau kelompok, hasil observasi terhadap suatu benda (fisik), kejadian atau kegiatan, dan hasil pengujian. Metode yang digunakan untuk mendapatkan data primer yaitu: (1) metode survei dan (2) metode observasi. Berdasarkan metode yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah Metode Observasi melalui wawancara terhadap pihak-pihak yang terkait dalam kontrak yakni PPK Proyek dari Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta dan Pimpinan proyek dari PT. Nindya Karya.

2) Data Sekunder

Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain). Data sekunder umumnya berupa bukti, catatan atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip (data dokumenter) yang dipublikasikan dan yang tidak dipublikasikan.

a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer ini terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi, atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan. Bahan hukum primer yang digunakan Penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata)
- 3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (UUJK)
- 4) Peraturan Presiden No. 16 tahun 2018, pelaku pengadaan barang/jasa untuk pengadaan melalui penyedia barang/jasa
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi

6) Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisa dan memahami bahan hukum primer: berupa: buku-buku literature, hasil karya ilmiah para sarjana, jurnal dan hasil penelitian sebagainya.

c) Bahan Hukum Tersier

Merupakan pelengkap yang sifatnya memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier dapat di contohkan seperti: Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), ensiklopedia, indeks komulatif dan seterusnya.²⁹ Bahan hukum tersier juga dapat bersumber dari media internet.

b. Sumber Data

1) Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Peneliti dalam melakukan penelitian ini memperoleh data dengan cara membaca buku-buku dan peraturan-peraturan yang berhubungan dengan perlindungan hukum bagi penyedia jasa konstruksi dalam kontrak konstruksi pada kasus lahan belum *clear and clean*. Penelitian kepustakaan tersebut dapat berupa:

a) Perpustakaan Universitas Andalas

²⁹ Soerjono Suekanto, Sri Mamudji, 2014, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT Raja Grafindo Persada:Jakarta , hlm 54.

- b) Perpustakaan Hukum Universitas Andalas
- c) Website Hukum/Jurnal
- d) Tesis terdahulu

2) Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Untuk memperoleh data pada penelitian ini, peneliti melakukan penelitian lapangan dengan cara turun langsung ke lokasi yaitu Proyek Pembangunan Polder/ Pompa KBN, Sunter C, Greenvil (RW 13), dan IKPN Bintaro, Penelitian ini dilakukan guna mendapatkan informasi secara langsung dari PPK Proyek, Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta dan Pimpinan proyek PT. Nindya Karya.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini akan digunakan teknik pengumpulan data dengan cara sebagai berikut:

a. Studi Dokumen

Studi Dokumen diperoleh dengan melakukan penelitian kepustakaan. Dengan mengadakan penelitian kepustakaan di perpustakaan Proyek Pembangunan Polder/ Pompa KBN, Sunter C, Greenvil (RW 13), dan IKPN Bintaro yang akan diperoleh data awal untuk digunakan dalam penelitian lapangan.

b. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara

(*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.³⁰ Ada dua tipe wawancara dalam tataran yang luas yaitu, terstruktur dan tidak terstruktur. Wawancara terstruktur adalah proses wawancara dengan menggunakan instrumen pedoman wawancara tertulis yang berisi pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan kepada informan. Dalam wawancara terstruktur runtunan pertanyaan-pertanyaan dan perumusannya sudah “harga mati” artinya sudah ditetapkan dan tidak boleh diubah-ubah. Sedangkan wawancara tidak terstruktur lebih bersifat luwes dan terbuka karena didalam pelaksanaannya lebih bebas dan tidak menggunakan pedoman.³¹ Didalam melakukan penelitian ini peneliti menggunakan teknik wawancara tidak terstruktur dengan mewawancarai PPK Proyek dari Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta dan Pimpinan proyek dari PT. Nindya Karya.

5. Pengolahan dan Analisis Data

a. Pengolahan Data

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik pengolahan data berupa editing yang mana maksudnya memeriksa kembali data yang sudah terkumpul baik dari studi kepustakaan maupun hasil wawancara dari studi lapangan, meliputi kelengkapan isian, keterbacaan tulisan, kejelasan jawaban, relevansi jawaban, keseragaman satuan data yang digunakan, dan lain sebagainya. Tujuan dari studi ini ialah untuk mengetahui apakah data yang sudah

³⁰ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, PT Remaja Rosdakarya:Bandung, 2021, hlm 186

³¹ Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif Teori & Praktik*, Jakarta: Bumi Aksara, 2019, hlm 163

dikumpulkan tersebut sudah lengkap atau belum dan disusun secara sistematis.

b. Teknik Analisis Data

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) menggunakan analisis kualitatif, menurut Moleong menyebutkan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dll, secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.³² Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif yaitu memberikan gambaran secara dan faktual tentang keadaan yang ada pada objek penelitian. Analisis penelitian kualitatif sering disebut penelitian naturalistik, karena penelitiannya dilakukan pada kondisi alamiah atau natural setting.³³ Analisis data penelitian ini adalah deskriptif kualitatif digunakan untuk menganalisis Perlindungan Hukum Bagi Penyedia Jasa Konstruksi Dalam Kontrak Konstruksi Pada kasus Lahan Belum Bersih Dan Bebas (*Clear And Clean*) Studi Kasus Pada Proyek Pembangunan Polder/ Pompa KBN, Sunter C, Greenvil (RW 13), dan IKPN Bintaro Jakarta Utara.

³² Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, PT Remaja Rosdakarya :Bandung 2021 hlm 6.

³³Sugiyono, 2017, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif*, Alfabeta: Bandung, 2017 hlm 63